

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, W. D., Retno, S. A., & Budi, P. P. (2022). Efektifitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.36418/Syntax>
- Asmawi, M., Amiluddin, & Sofwan, E. (2021). Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Mencegah Praktik Politik Uang. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 2(1).
- BPK RI. (2018). *Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Kepatuhan*.
- BPK RI. (2020). *Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN*.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. (2015). *Kajian Tata Kelola Bantuan Sosial Kementerian Lembaga*.
- Etienne, J. (2011). Compliance theory: A goal framing approach. *Law and Policy*, 33(3), 305–333. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2011.00340.x>
- Hamdani. (2019). *Peran Infrastruktur dan Proses Bisnis Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua serta Dukungan Reviu Laporan Keuangan pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Universitas Trisakti.
- Husni, M., Idayu, R., & Supriyatna, N. (2022a). Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat. *Owner*, 6(4), 4062–4070. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019>
- Husni, M., Idayu, R., & Supriyatna, N. (2022b). Faktor Penyebab Temuan Berulang pada Pemeriksaan Inspektorat. *Owner*, 6(4), 4062–4070. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1019>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Kementerian Keuangan. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/Lembaga*. www.jdih.kemenkeu.go.id
- Kementerian Sosial. (2019). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial*.

- Latif, S. L., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *Justisia*, 8(2). <https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1612/963>
- Leliana, I., Suratriadi, P., & Enrieco, E. (2021). *Analisis Framing Model Robert Entman Tentang Pemberitaan Kasus Korupsi Bansos Juliari Batubara Di Kompas.Com Dan BBC Indonesia.Com*. 21(2), 60–67. <https://doi.org/10.31294/jc.v19i2>
- Lestari, A. D., & Rohman, A. (2022). Pengaruh Temuan Audit dan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Melalui Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada LKPD Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia Tahun 2016-2017). *Diponegoro Juornal of Acconting*, 11(2), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/33901>
- Noerkaisar, N. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Sosial Pemerintah untuk Mengatasi Dampak Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(1). <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/view/363>
- Setneg. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5251>
- Rahayu, R., Kusrin, & Purnamasari, H. (2021). Program Keluarga Harapan dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Cibuaya Kabupaten Karawang. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8(1).
- Sayekti, F. N. (2020). Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 5(3). <https://doi.org/10.22146/abis.v5i3.59274>
- Setneg. (2004). *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40509/uu-no-15-tahun-2004>
- Setneg. (2009). *Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38601/uu-no-11-tahun-2009>
- Setneg. (2013). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Setneg. (2017). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*. www.peraturan.go.id
- Setneg. (2022). *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023*.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Teja, M. (2020). Permasalahan Keakuratan Data Penerima Bantuan Sosial Covid-19. *Info Singkat Bidang Kesejahteraan Sosial*, XII(18), 13–18.

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 8 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40184/uu-no-15-tahun-2006>

Yusrizal, Y. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 21. <https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065>

